



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2023 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2023 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2019–2024. Penyusunan RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Dokumen RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2023 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, November 2022



Drs. SAMSURIJAL, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	23
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	24
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	25
4.1 Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	25
V. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD Perubahan Tahun 2021	6
Tabel 2.1.2. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2021 s/d Triwulan IV.....	8
Tabel 2.1.3. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2021 s/d Triwulan IV.....	9
Tabel 2.1.4. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2021 2021 s/d Triwulan IV	15
Tabel 2.1.4. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2021 s/d Triwulan IV	17
Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2021	18
Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2021	19
Tabel 2.2.3. Data Rekapitulasi Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2021	19
Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung	20
Tabel 2.2.5. Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020	21
Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2023 yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2023 dan prioritas pembangunan nasional 2023 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2023 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 491);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2024;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2023.

1.3.2 Maksud

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2023 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2023.

1.4.4 BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian RENJA Terhadap RENSTRA

❖ Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2021

Dibawah ini adalah tabel perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara RENJA dengan APBD Perubahan Tahun 2021 dimana dalam APBD Perubahan tahun 2021 ada 2 sub kegiatan yang terkena Refocussing anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Tabel 2.1.1. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Perangkat Daerah Dengan APBD Perubahan Tahun 2021

KODE REK						URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
2.						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
2.	17.					BIDANG KOPERASI DAN UKM			
2.	17.	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	
2.	17.	01.	1.	05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	Refocusing
2.	17.	01.	1.	05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	X	Refocusing
2.	17.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	02.				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	01.	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	02.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	√	√	
2.	17.	04.				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	02.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	√	√	
2.	17.	05.				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	
2.	17.	07.				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√	

KODE REK					URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
2.	17.	07.	1.	01.		√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	√	√	
2.	17.	08.				√	√	
2.	17.	08.	1.	01.		√	√	
2.	17.	08.	1.	01.	01.	√	√	

❖ **Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021**

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2021. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja baik fisik maupun keuangan kegiatan tahun 2021 dengan realisasi kinerja fisik maupun keuangan kegiatan di tahun 2021 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.1.2. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2021 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	91,01	91,01
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100	94,76	94,76
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100	95,62	95,62
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100	98,17	98,17
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100	98,07	98,07
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100	99,90	99,90
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100	90,68	90,68
8	Program Pengembangan UMKM	100	99,57	99,57
	RATA-RATA JUMLAH	100	92,56	92,56

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sudah sangat tinggi meskipun masih ada yang tidak terlalu tinggi realisasinya karena beberapa kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan karena pandemi covid-19 yang belum juga usai. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 99,90 persen dan terendah ada pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran sebesar 90,68 persen.

Tabel 2.1.3. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2021 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	39,62	41,77	105,42
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30,66	31,30	102,08
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	57,14	56,75	99,39
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26,55	29,38	106,39
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14,15	15,27	107,88
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,5	0,54	108,12
8	Program Pengembangan UMKM	4,19	4,52	107,88
	RATA-RATA JUMLAH			104,64

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 sudah melampaui target yaitu rata-rata sebesar 104,64 persen dengan capaian terendah ada pada program Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 99,39 persen sedangkan capaian tertinggi ada pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 108,12 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian dapat dilihat pada lampiran 3.2).

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.912.889.633,38,- terealisasi Rp. 11.751.569.772,- terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 201.280.800,- Indikatornya adalah Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 100 Persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 193,480,800,-. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 185.060.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 177,260,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 16.220.800,- realisasi keuangan Rp. 16.220.800,- dan realisasi fisik sebesar Rp. 100 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.493.864.108,38,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Keuangan OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan Rp. 9,515,367,392. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.463.864.108,38,- realisasi keuangan Rp. 9,485,367,392,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 53.138.900,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Kepegawaian OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan Rp. 36,100,000,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 53.138.900,- realisasi keuangan Rp. 36,100,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,- (efisiensi)

c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,- (efisiensi)

4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah Rp. 502.058.125,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Umum OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan Rp. 483,525,315,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 20.000.000,- realisasi keuangan Rp. 19,999,400,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 20.000.000,- realisasi keuangan Rp. 20,000,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 17.296.800,- realisasi keuangan Rp. 17,296,800,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.200.000,- realisasi keuangan Rp. 0 dan realisasi fisiknya sebesar 0 persen
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 61.440.325,- realisasi keuangan Rp. 60,789,200,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
 - f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 35.800.000,- realisasi keuangan Rp. 31,100,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 342.321.000,- realisasi keuangan Rp. 334,339,915,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 502.625.500,- indikatornya terlaksananya pengadaan barang milik daerah di OPD sebanyak 30 unit. Realisasi keuangan Rp. 499.138.000 Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 502.625.500,- realisasi keuangan Rp. 4.99.138.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 739.953.400,- indikatornya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa

Penunjang Operasional OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan Rp. 628,445,121,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 325.947.000,- realisasi keuangan Rp. 214,438,721,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 414.006.400,- realisasi keuangan Rp. 414,006,400,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 419.968.800,- indikatornya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan Rp. 395,513,144,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 74.390.000,- realisasi keuangan Rp. 61,988,400,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 318.078.800,- realisasi keuangan Rp. 306,024,744 - dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 27.500.000,- realisasi keuangan Rp. 27,500,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Rp. 787.783.000, realisasi keuangan Rp. 746,500,000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 345.283.000,- realisasi keuangan Rp. 331,925,000,- indikator kegiatan terfasilitasinya pelayanan izin usaha simpan pinjam di 15 kabupaten/kota dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 345.283.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu jumlah kelompok yang disuluh sebanyak 50 kelompok realisasi keuangan Rp. 331,925,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 96 persen
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 442.500.000,- realisasi keuangan Rp. 414,575,000,- indikator kegiatannya adalah terfasilitasinya akta pendirian koperasi sebanyak 50 koperasi dengan sub kegiatannya yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 442.500.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah jumlah koperasi yang difasilitasi izin nya sebanyak 50 koperasi realisasi keuangan Rp. 414,575,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 96 persen
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 94.539.000,- realisasi keuangan Rp. 90.395.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**
 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 94.539.000,- dengan indikator kegiatannya adalah jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa kelembagaan dan usahanya serta kepatuhannya sebanyak 65 koperasi. Realisasi keuangan Rp. 90.395.000,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Rp. 46.629.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan

Usahanya sebanyak 30 koperasi. Realisasi keuangan Rp. 44.175.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 47.910.000- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 35 koperasi. Realisasi keuangan Rp. 46.220.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 62.943.000,- realisasi keuangan Rp. 23.184.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 62.943.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya sebanyak 40 koperasi dan realisasi keuangan Rp. 61,789,000,- dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 62.943.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi yang telah dinilai permodalannya, kualitas aktifa produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri, dan pertumbuhannya serta kemandiriannya sebanyak 40 koperasi. Realisasi keuangan Rp. 61,789,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.600.933.100,- realisasi keuangan Rp. 2,550,689,500,- Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.600.933.100,- sudah terealisasi Rp. 2,550,689,500,- indikatornya adalah Meningkatnya Pengetahuan SDM Koperasi dan Pelaku UMKM sebanyak 736 KUMKM dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.600.933.100,- indikatornya adalah Jumlah pelaku koperasi dan pelaku UMKM yang dilatih sebanyak 736 orang. Realisasi keuangan Rp. 1.247.026.202,550,689,500,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.352.080.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 19 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 696 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.4. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2021

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KET
1	Bimtek tenaga pendamping	26 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
2	Pelatihan start up capital bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
3	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha tani wanita	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
4	Pelatihan peningkatan resiliensi bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
5	Pelatihan akutansi koperasi pola syariah	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
6	Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas RAT	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
7	Pelatihan desain label dan kemasan produk bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
8	Pelatihan pembukuan digital bagi koperasi sektor riil	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
9	Pelatihan kompetensi bagi costumer service ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
10	Pelatihan kompetensi bagi Kepala Cabang/Manager ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
11	Pelatihan menejemen ekosistem perkoperasian	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
12	Pelatihan vocational bidang kerajinan di Tulang Bawang	35 orang	Tulang Bawang	Sudah dilaksanakan
13	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Lampung Barat	35 orang	Lampung Barat	Sudah dilaksanakan
14	Pelatihan vocational bidang pariwisata di Pesisir Barat	35 orang	Pesisir Barat	Sudah dilaksanakan
15	Pelatihan vocational desain produk bagi umkm	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
16	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di	35 Orang	Way Kanan	Sudah dilaksanakan

	Way Kanan			
17	Pelatihan vocational bidang hortikultura di Lampung Selatan	35 Orang	Lampung Selatan	Sudah dilaksanakan
18	Pelatihan adaptasi umkm menghadapi new normal	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
19	Pelatihan kepemimpinan koperasi berbasis ekosistem	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
	TOTAL	696 Orang		

5. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 392.766.800,- terealisasi Rp. 392,359,800,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 392.766.800,- terealisasi Rp. 392,359,800,- indikator kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Koperasi yang Meliputi Akses Pasar Pembiayaan Kelembagaan Penataan Manajemen Restruktisasi Usaha dengan target 40 koperasi. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restruktisasi Usaha Rp. Rp. 392.766.800,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi permodalan, pemasaran dan jaringan usahanya sebanyak 40 koperasi. Realisasi keuangan Rp. 392,359,800,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.172.835.000,- terealisasi Rp 1,063,516,800,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.172.835.000,- terealisasi Rp. 1,063,516,800,- indikator kegiatannya adalah Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha bagi UMKM sebanyak 105 UMKM. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. Rp. 1.172.835.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah UMKM yang dibina dengan target 105 UMKM. Realisasi keuangan Rp. 1,063,516,800,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

7. Program Pengembangan UMKM Rp. 393.503.000,- terealisasi Rp. 74.284.800,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 393.503.000,- terealisasi Rp. 391,803,000,- indikator kegiatannya adalah Meningkatnya skala usaha UMKM, pendampingan bagi UMKM, pemasaran produk UMKM dan kinerja layanan PLUT dengan target 240 UMKM. Sub kegiatannya sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 393.503.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Terlaksananya pelatihan vocational bagi UMKM, bazar produk UMKM dan pengadministrasian PLUT dengan target 240 UMKM. Realisasi keuangan Rp. 391,803,000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

❖ Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021/IKU Perangkat Daerah

Tabel 2.1.5. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2021 s/d Triwulan IV

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	33,54	35,17	104,86
		1. Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	2,16	2,28	105,56

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah sangat baik bahkan dari ke 2 indikator sudah memenuhi harapan dimana Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 33,54 persen yang ditargetkan di tahun 2021 tercapai 35,17 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 104,86 persen. Capaian ini diluar dugaan mengingat efek dari pandemic covid 19 yang sangat dirasakan oleh pelaku koperasi sehingga banyak koperasi yang mengalami kesulitan usaha tetapi nyatanya koperasi masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari target sebesar 2,16 persen terealisasi 2,3 persen atau sebesar 106,48. Hal ini sangat diluar dugaan karena tercapai lebih dari seratus persen meskipun beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena pandemic covid yang belum juga reda, tetapi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan masih bisa meningkatkan usaha kecil menjadi wirausaha.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung baik koperasi yang menjadi kewenangan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2013, dari semula 1.940 unit koperasi menjadi 3.121 unit koperasi aktif pada tahun 2016 atau 58,6 % dari total unit koperasi di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada tahun 2020 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 2.087 unit. Pada tahun 2021 koperasi aktif kembali meningkat menjadi 2,282 unit.

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Data Koperasi Provinsi Lampung 2013-2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi (unit)	4.751	4.932	5.099	5.325	5.340	5.341	5.423	5.653	5.862
Jumlah Anggota (orang)	412.617	683.523	586.937	887.537	681.026	772.968	455.374	2.273.853	658.667
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1.940	2.095	2.246	3.121	2.471	2.476	2.016	2.087	2.282
Jumlah Koperasi RAT (unit)	370	548	583	791	643	673	5.99	748	734

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan jenisnya, 48 persen atau 2.826 unit Koperasi di Provinsi Lampung merupakan Koperasi Konsumen yaitu Koperasi yang anggotanya

merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan jenis koperasi lainnya, unit koperasi Jasa di Provinsi Lampung mulai berkembang. Seiring kemajuan sektor Pariwisata di Provinsi Lampung, koperasi akan terus didorong untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata terutama pada *community based tourism* seperti desa wisata dan agro/ekowisata. Data koperasi berdasarkan jenisnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.2.2. Data Koperasi Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tahun 2021

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH	AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Produsen	1.185	499	1.386
2.	Pemasaran	104	46	58
3.	Konsumen	2.826	1.141	1.685
4.	Jasa	168	100	68
5.	Simpan Pinjam	879	496	383
	Jumlah	5.862	2.282	3.580

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Provinsi Lampung jenis usaha yang paling dominan adalah koperasi konsumen, disusul oleh simpan pinjam lalu produsen dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 658.667 orang pada tahun 2021.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 61.947 UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat menjadi 95.158 UMKM pada 2016 dan 157.922 UMKM pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sejumlah 168.938 unit. Pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 150.999 unit usaha. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2021.

Tabel 2.2.3. Data Rekapitulasi Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Bandar Lampung	116.615	1.875	43	118.533
2	Metro	23.186	580	88	23.854
3	Lampung Tengah	795	1	0	796
4	Lampung Timur	425	122	0	547
5	Lampung Utara	423	30	4	457
6	Lampung barat	1.638	105	4	1.747
7	Lampung Selatan	701	0	0	701
8	Tulang Bawang	23	0	0	23
9	Tulang Bawang Barat	179	0	0	179
10	Mesuji	250	41	1	292

NO	KABUPATEN/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
11	Pringsewu	1.891	40	2	1.933
12	Pesawaran	460	20	2	482
13	Way Kanan	725	103	12	840
14	Pesisir Barat	429	0	0	429
15	Tanggamus	186	0	0	186
Jumlah		147.926	2.917	156	150.999

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2021

Beberapa UKM unggulan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Data UMKM Unggulan di Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	KOTA
KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
KATEGORI BATIK		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
KATEGORI FURNITURE		
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung
KATEGORI HANDICRAFT		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
KATEGORI SPA DAN HERBAL		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

Dalam rangka fasilitasi permodalan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyalurkan

Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 2.2.5. Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM melalui BLUD Perkuatan Modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013-2020

Tahun	Volume Penyaluran (Rp)	Jumlah KUMKM
2013	2.885.000.000	128
2014	4.987.500.000	196
2015	3.885.000.000	146
2016	4.210.000.000	134
2017	4.105.000.000	159
2018	4.020.000.000	149
2019	2.540.000.000	83
2020	-	-

Sumber : BLUD Perkuatan Permodalan KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2019

Pada tabel di atas, terdapat data volume penyaluran dalam rupiah dan jumlah UMKM di Provinsi Lampung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah volume penyaluran dana bergulir bagi koperasi dan UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah UMKM di provinsi lampung mengalami fluktuasi. Jumlah UMKM terbanyak ada pada Tahun 2014 sebanyak 196 UMKM, sedangkan jumlah UMKM paling sedikit ada pada Tahun 2019 yakni 83 UMKM. Sementara itu sesuai Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/2843/VI.02/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir maka pada tahun 2020 dana bergulir tidak lagi disalurkan.

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM serta Iklim Usaha yang Belum Kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian, rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, rendahnya kewirausahaan, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM,

masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
3. Masih rendahnya kewirausahaan
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk
5. Masih rendahnya peran perempuan dalam aktifitas ekonomi serta adanya disparitas gender antara laki-laki dan perempuan.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2023 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonom

Sejalan dengan Prioritas Nasional dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi”**. Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 6 (enam) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke 1 (satu) yaitu **“MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN”**.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah menyesuaikan dengan Prioritas Nasional yang semula hanya terdapat 2 (dua) prioritas menjadi 6 (enam) Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1. Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35,22
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1. Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	4.47

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

4.1 Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023 ini berdasarkan **Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 (Lampiran 4.1) :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.457.151.533,55,- terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 137.238.000,- Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 85.000.000,- indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 52.238.000,- indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.169.719.441,93,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.129.719.441,93 indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 20.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 20.000.000,- indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 472.262.000,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 12.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 10.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 15.000.000,- indikatornya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 107.500.000,- indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000,- indikatornya Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 287.762.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 188.876.000,- indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 188.876.000,- indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 19 unit

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 806.232.091,62,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 331.347.000,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 474.885.091,62,- indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 642.824.000,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 41.700.000,- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 198.755.000,- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 32.460.000,- indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 15 unit
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 369.909.000,- indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit

Program Utama (7 Program) terdiri dari :

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 400.000.000, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 200.000.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 13 unit usaha
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 275.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 275.000.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 16 unit usaha

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 250.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 250.000.000,- dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Rp. 150.000.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat sebanyak 1 dokumen
- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 100.000.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel sebanyak 30 unit usaha

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 150.000.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 150.000.000,- indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 150.000.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 3.733.439.000,- Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp.

3.733.439.000,- indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 3.733.439.000,- indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 1.015 orang

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 400.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 400.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. Rp. 400.000.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 45 unit usaha

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.800.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.800.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan

Pengentasan Kemiskinan Rp. Rp. 1.700.000.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 300 unit usaha

- b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 100.000.000,- indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 600.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 600.000.000,- indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahnya sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 600.000.000,- dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 70 unit usaha

V. PENUTUP

Penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Dokumen RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2023 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Provinsi Lampung	100 Persen	12,457,151,533.55	APBD		100 Persen	13,309,581,169.00
2.17.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	137,238,000.00	APBD		100 Persen	225,000,000.00
2.17.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	10 Dokumen	85,000,000.00	APBD		12 Dokumen	175,000,000.00
2.17.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	11 Laporan	52,238,000.00	APBD		11 Laporan	50,000,000.00
2.17.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	10,169,719,441.93	APBD		100 Persen	10,804,581,169.00
2.17.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Lampung	75 Orang/Bulan	10,129,719,441.93	APBD		75 Orang/Bulan	10,724,581,169.00
2.17.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Lampung	36 Dokumen	10,000,000.00	APBD		36 Dokumen	15,000,000.00
2.17.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Lampung	1 Laporan	10,000,000.00	APBD		1 Laporan	15,000,000.00
2.17.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Lampung	17 Laporan	20,000,000.00	APBD		17 Laporan	50,000,000.00
2.17.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	20,000,000.00	APBD		100 Persen	20,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	2 Laporan	10,000,000.00	APBD		2 Laporan	10,000,000.00
2.17.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	2 Laporan	10,000,000.00	APBD		2 Laporan	10,000,000.00
2.17.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	100 Laporan	20,000,000.00	APBD		100 Laporan	50,000,000.00
2.17.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Lampung	2 Orang	20,000,000.00	APBD		3 Orang	50,000,000.00
2.17.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	472,262,000.00	APBD		100 Persen	450,000,000.00
2.17.01.106.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Lampung	1 Paket	12,000,000.00	APBD		1 Paket	10,000,000.00
2.17.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Lampung	1 Paket	10,000,000.00	APBD		1 Paket	10,000,000.00
2.17.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Lampung	1 Paket	15,000,000.00	APBD		1 Paket	15,000,000.00
2.17.01.106.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi Lampung	2 Paket	107,500,000.00	APBD		2 Paket	75,000,000.00
2.17.01.106.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Lampung	12 Laporan	40,000,000.00	APBD		12 Laporan	40,000,000.00
2.17.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	12 Laporan	287,762,000.00	APBD		12 Laporan	300,000,000.00
2.17.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	188,876,000.00	APBD		100 Persen	500,000,000.00
2.17.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Lampung	19 Unit	188,876,000.00	APBD		50 Unit	500,000,000.00
2.17.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	806,232,091.62	APBD		100 Persen	825,000,000.00
2.17.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Lampung	12 Laporan	331,347,000.00	APBD		12 Laporan	370,000,000.00
2.17.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Lampung	12 Laporan	474,885,091.62	APBD		12 Laporan	455,000,000.00
2.17.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Lampung	100 Persen	642,824,000.00	APBD		100 Persen	435,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Lampung	1 Unit	41,700,000.00	APBD		1 Unit	75,000,000.00
2.17.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Lampung	9 Unit	198,755,000.00	APBD		9 Unit	300,000,000.00
2.17.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Lampung	15 Unit	32,460,000.00	APBD		20 Uni	10,000,000.00
2.17.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Lampung	1 Unit	369,909,000.00	APBD		1 Unit	50,000,000.00
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	44.33 Persen	400,000,000.00	APBD		46.70 Persen	800,000,000.00
2.17.02.101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	Provinsi Lampung	100 Persen	200,000,000.00	APBD		100 Persen	400,000,000.00
2.17.02.101.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Provinsi Lampung	13 Unit Usaha	200,000,000.00	APBD		15 Unit Usaha	400,000,000.00
2.17.02.102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya	Provinsi Lampung	100 Persen	200,000,000.00	APBD		100 Persen	400,000,000.00
2.17.02.102.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	16 Unit Usaha	200,000,000.00	APBD		18 Unit Usaha	400,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	42.45 Persen	250,000,000.00	APBD		47.17 Persen	300,000,000.00
2.17.03.101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Lampung	100 Persen	250,000,000.00	APBD		100 Persen	300,000,000.00
2.17.03.101.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Provinsi Lampung	1 Dokumen	150,000,000.00	APBD		1 Dokumen	150,000,000.00
2.17.03.101.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Provinsi Lampung	30 Unit Usaha	100,000,000.00	APBD		30 Unit Usaha	150,000,000.00
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	71.42 Persen	150,000,000.00	APBD		78.57 Persen	200,000,000.00
2.17.04.101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya	Provinsi Lampung	100 Persen	150,000,000.00	APBD		100 Persen	200,000,000.00
2.17.04.101.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Provinsi Lampung	30 Unit Usaha	150,000,000.00	APBD		30 Unit Usaha	200,000,000.00
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	26.55 Persen	3,733,439,000.00	APBD		26.55 Persen	2,750,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.05.101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	Provinsi Lampung	100 Persen	3,733,439,000.00	APBD		100 Persen	2,750,000,000.00
2.17.05.101.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Provinsi Lampung	1.015 Orang	3,733,439,000.00	APBD	Termasuk DAK Non Fisik	980 Orang	2,750,000,000.00
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	21.22 Persen	400,000,000.00	APBD		23.58 Persen	500,000,000.00
2.17.06.101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha	Provinsi Lampung	100 Persen	400,000,000.00	APBD		100 Persen	500,000,000.00
2.17.06.101.02	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Provinsi Lampung	45 Unit Usaha	400,000,000.00	APBD		50 Unit Usaha	500,000,000.00
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Provinsi Lampung	0.5 Rasio	1,800,000,000.00	APBD		0.5 Rasio	1,250,000,000.00
2.17.07.101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Provinsi Lampung	100 Persen	1,800,000,000.00	APBD		100 Persen	1,250,000,000.00
2.17.07.101.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Provinsi Lampung	100 Unit Usaha	1,700,000,000.00	APBD		100 Unit Usaha	900,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.101.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Provinsi Lampung	30 Orang	100,000,000.00	APBD		30 Orang	350,000,000.00
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Provinsi Lampung	8.22 Persen	600,000,000.00	APBD		10.91 Persen	500,000,000.00
2.17.08.101	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	Provinsi Lampung	100 Persen	600,000,000.00	APBD		100 Persen	500,000,000.00
2.17.08.101.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Provinsi Lampung	70 Unit Usaha	600,000,000.00	APBD	Termasuk Honor Konsultan PLUT	250 Unit Usaha	500,000,000.00
TOTAL PAGU					19,790,590,533.55				19,609,581,169.00

BANDAR LAMPUNG, NOVEMBER 2022

KEPALA DINAS



Drs. SAMSURIJAL, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670418199203 1 003